

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dalam sudut pandang ekonomi dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang, baik secara finansial maupun semua jenis kesejahteraan masyarakat (Suryawati, 2005).

Secara umum, konsep kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok minimum atau kebutuhan dasar yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai

penduduk miskin. Sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan. Semakin besar ketimpangan antara penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar jumlah penduduk yang dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Secara umum, kemiskinan disebabkan oleh dua kondisi, yaitu kondisi alamiah dan kondisi buatan. Kondisi alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, rendahnya penggunaan teknologi, dan bencana alam. Kemiskinan buatan terjadi akibat lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua macam berdasarkan penyebabnya yaitu (Nugroho & Dahuri, 2004) :

- a. Kemiskinan struktural yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan, kemiskinan ini umumnya dapat dikenal dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang.
- b. Kemiskinan kuktural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan.

Dalam strategi penanggulangan kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki atau perempuan yang tidak

dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk bertahan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain ialah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rumah, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan, keamanan, hak untuk partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, yang bersifat multidimensi, dan tidak mudah dilihat dari suatu angka absolut.

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu pada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep yang tidak mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif (Todaro & Smith, 2006). Banyak metode yang dapat digunakan dalam mengukur kemiskinan, namun belum ada bukti indikator yang benar tepat dan sesuai yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi kemiskinan yang bisa diberlakukan secara umum. Ukuran kemiskinan dapat dibedakan menjadi berikut (Kuncoro, 1997):

1. Kemiskinan absolut, suatu kondisi ketidakmampuan atau nyaris tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Konsep kemiskinan absolut adalah jumlah masyarakat yang hidup di bawah tingkat penghasilan minimum dalam keperluan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
2. Kemiskinan relatif, suatu keadaan kemiskinan yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, kemiskinan ini menyebabkan ketimpangan pada sisi pendapatan.

3. Kemiskinan kultural, suatu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh mental atau nilai yang dianut, tidak ada niat usaha dalam memperbaiki taraf hidup, tidak kreatif dan tidak mau berjuang meskipun ada bantuan dari pihak luar.

Bank Dunia menetapkan ukuran standar pada kemiskinan mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Berdasarkan Bank Dunia, kriteria tingkat ketimpangan yaitu apabila persentase pengurangan pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat ketimpangan yang tinggi. Apabila persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat ketimpangan moderat/ sedang/ menengah. Apabila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat ketimpangan yang rendah.

Menurut BPS, tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2.100 kalori per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Ketentuan yang menjadi dasar kecukupan 2.100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini disebut dengan garis kemiskinan.

Menurut Sajogyo dalam Mudrajat (2006), ukuran kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan. Seseorang dikatakan miskin apabila konsumsi per kapita setara dengan 20 kg beras untuk daerah pedesaan dan 30 kg beras untuk daerah perkotaan.

2.1.2 Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survei (sampel). Angka kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

Pemikiran sosial saat ini lebih banyak memfokuskan penyebab kemiskinan pada faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang terdapat di suatu daerah. Faktor-faktor tersebut merupakan dimensi dari kesejahteraan atau kemiskinan yang selanjutnya dijadikan sebagai faktor yang menentukan besarnya penduduk miskin (Saleh, 2002).

2.1.3 Konsep Gender

Gender menggambarkan kesamaan peran, pekerjaan, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan antara laki-laki dan perempuan. Gender merujuk pada peran, perilaku, kegiatan, atribut dan peluang yang dianggap sesuai oleh masyarakat

untuk perempuan dan laki-laki. Gender merupakan istilah populer di masyarakat yang dapat memberikan gambaran terkait perilaku, peran, sikap, sifat, dan atribut yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peranan antara pria dan wanita dapat dibedakan di antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya sesuai dengan lingkungannya. Peran gender dapat berubah dari masa ke masa dikarenakan kemajuan pendidikan, teknologi, ekonomi, dan lainnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa peran gender dapat ditukarkan antara pria dengan wanita (Aryani, 2002).

Untuk mengukur capaian pemberdayaan gender di Indonesia dapat menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Fungsi dari IPG digunakan untuk mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak.

2.1.3 Indeks Pembangunan Gender

IPG adalah sebuah indikator yang menggambarkan perbandingan maupun rasio capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki (Asmanto, 2008). Pembangunan Gender digunakan sebagai ukuran dalam mengetahui pembangunan manusia. IPG mampu mengukur tingkat capaian kemampuan dasar pembangunan manusia, yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan memperhitungkan ketimpangan gender. Pengukuran tersebut diukur dengan semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100 artinya pembangunan antara laki-laki dan perempuan menjadi lebih setara. Begitu pun sebaliknya, di mana semakin jauh dari angka 100 maka semakin besar pula perbedaan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 menjelaskan standar angka IPG dikarenakan angka 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

IPG merupakan ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu:

1. Kesehatan dan umur panjang, pada dimensi ini indikator yang digunakan adalah angka harapan hidup laki-laki dan perempuan pada saat lahir. Perempuan cenderung memperhatikan dan keingintahuannya tentang kesehatan lebih tinggi dibandingkan laki-laki dan lebih memperhatikan barang-barang yang mereka beli yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan.
2. Pendidikan, dalam mengukur kualitas pembangunan manusia, dimensi pendidikan diwakili dua indikator yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, maka semakin tinggi pula kualitas pembangunan yang dicapai.
3. Standar hidup layak, pada dimensi standar hidup yang layak menggunakan indikator perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan. Faktor ekonomi atau standar hidup layak merupakan salah satu dimensi yang berpengaruh signifikan dalam pembangunan manusia. Keberhasilan pembangunan dilihat dari kemampuan perekonomiannya, tak terkecuali dalam pembangunan manusia dan pembangunan gender. UNDP (*United Nations Development Programme*) menggunakan pengeluaran per kapita dalam mengukur capaian pembangunan manusia dari sisi ekonomi. Kesenjangan pada sisi ekonomi dapat diketahui pada perbandingan atau rasio pengeluaran perkapita perempuan dan laki-laki. Kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan telah berlangsung sejak lama.

Dalam menghitung IPG dapat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks pembangunan manusia dihitung berdasarkan data yang menggambarkan empat komponen yaitu angka harapan hidup yang digunakan untuk mengukur keberhasilan di bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang mengukur keberhasilan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan untuk mengukur keberhasilan di bidang pembangunan untuk hidup layak. Setiap komponen IPG distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPG. Berikut ini adalah nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen IPG:

Tabel 2.1
Batas Maksimum dan Minimum Komponen IPG

KOMPONEN	SATUAN	MAKSIMUM		MINIMUM	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Tahun	82,5	87,5	17,5	22,5
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	18	18	0	0
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	25	25	0	0
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Rupiah	26.572.352		1.007.436	

Penyusunan indeks untuk indikator dalam dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan dan dimensi pengeluaran menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dimensi Kesehatan: } i_{KESEHATAN} = \frac{AHH - AHH_{MIN}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

$$\text{Dimensi Pendidikan: } i_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{MIN}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$i_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{MIN}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$i_{PENDIDIKAN} = \frac{i_{HLS} - i_{RLS}}{2}$$

$$\text{Dimensi Pengeluaran: } i_{PENGELUARAN} = \frac{\ln(PENGELUARAN) - \ln(PENGELUARAN)_{min}}{\ln(PENGELUARAN)_{maks} - \ln(PENGELUARAN)_{min}}$$

IPG dihitung sebagai rasio antara indeks pembangunan manusia (perempuan) dengan indeks pembangunan manusia (laki-laki), menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPG = \frac{IPM_p}{IPM_l} \times 100$$

Adapun perhitungan IPM perempuan dan IPM laki-laki sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPM_{laki-laki} = \sqrt[3]{l_{kesehatan} \times l_{pendidikan} \times l_{pengeluaran} \times 100}$$

$$IPM_{perempuan} = \sqrt[3]{l_{kesehatan} \times l_{pendidikan} \times l_{pengeluaran} \times 100}$$

Interpretasi angka IPG yaitu apabila semakin mendekati angka 100, maka capaian pembangunan kapabilitas antara laki-laki dengan perempuan semakin setara. Sebaliknya, apabila semakin jauh dari angka 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan kapabilitas laki-laki dan perempuan.

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut BPS, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha atau merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan (putus asa) atau penduduk yang sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh suatu pekerjaan tetapi belum bisa mendapatkannya (Sukirno, 1994). Faktor utama yang

menyebabkan terjadinya pengangguran yaitu karena kurangnya permintaan agregat. Artinya, pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, namun keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha menjual barang dan jasa yang diproduksi. Jika permintaan semakin besar, maka barang dan jasa yang diproduksi pun akan semakin besar, sehingga kenaikan jumlah produksi akan menambah penggunaan tenaga kerja. Pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan penyebabnya (Sukirno, 2010b):

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau yang sesuai dengan keinginannya.
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan karena adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
3. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan karena kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

Adapun jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya antara lain:

1. Pengangguran terbuka

Menurut BPS, pengangguran terbuka adalah penduduk yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi belum atau tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran ini disebabkan karena

penambahan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tenaga kerja yang mengakibatkan banyaknya tenaga kerja tidak dapat memperoleh pekerjaan.

2. Pengangguran tersembunyi

Pengangguran ini disebabkan karena lebihnya tenaga kerja dalam satu unit yang diperlukan, sedangkan dengan mengurangi jumlah pekerja tertentu tidak mengurangi jumlah produksi. Pengangguran ini biasanya terjadi pada sektor industri dan jasa.

3. Pengangguran musiman

Pengangguran yang terjadi di masa-masa tertentu dalam satu tahun. Pengangguran ini sering terjadi pada sektor pertanian, biasanya petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan akan kembali bekerja disaat musim panen.

4. Setengah menganggur

Pengangguran ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tidak bekerja secara optimal dan hanya bekerja di bawah jam kerja normal dikarenakan tidak adanya lapangan pekerjaan.

Pengaruh negatif pengangguran terhadap kemiskinan yaitu berkurangnya tingkat kemakmuran atau kesejahteraan yang telah dicapai seseorang dikarenakan pendapatan masyarakat yang berkurang karena tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran akan memberikan dampak pada penurunan kesejahteraan seseorang karena tidak memiliki pendapatan yang akan meningkatkan peluang untuk terjebak di dalam kemiskinan (Sukirno, 2004).

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi atau keadaan ekonomi dalam suatu negara pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2010). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi mampu menjadi lebih baik ataupun menurun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal tersebut dapat diketahui dengan menggunakan sebuah indikator.

Indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) karena pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai pertambahan pendapatan nasional pertambahan output suatu barang dan jasa yang diproduksi pada suatu negara. PDB merupakan nilai pasar dari barang dan jasa yang diproduksi pada suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Ukuran kemakmuran ekonomi dihitung dengan menggunakan output barang dan jasa perekonomian dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan harga (Mankiw, 2007). Berdasarkan hal tersebut, maka ekonom menggunakan PDB riil barang dan jasa yang diukur dengan menggunakan harga konstan. Rumus pada PDB riil sebagai berikut:

PDB Riil = Output yang diproduksi x Harga tahun dasar

Selain PDB riil alat ukur lainnya adalah PDB nominal. PDB nominal digunakan untuk mengukur produksi barang dan jasa yang dinilai dengan harga pada masa sekarang. PDB nominal dipengaruhi oleh kenaikan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Untuk mengetahui perhitungan PDB nominal, maka harus mengetahui perhitungan PDB deflator. PDB deflator merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengamati rata-rata tingkat harga dalam perekonomian dengan menggunakan harga output pada tahun dasar. Rumus pada PDB deflator dan PDB nominal adalah sebagai berikut:

$$PDB\ Deflator = \frac{PDB\ nominal}{PDB\ riil}$$

$$PDB\ nominal = \frac{PDB\ nominal}{PDB\ deflator}$$

Untuk mengetahui pertumbuhan regional dapat menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari seluruh kegiatan pada suatu daerah dalam periode satu tahun dan dinyatakan dengan harga pasar. PDRB dibagi dalam 2 bentuk yaitu:

1. PDRB berdasarkan harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran yang dihitung berdasarkan harga tetap, di mana nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

2. PDRB berdasarkan harga berlaku yaitu jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian pada suatu wilayah. PDRB berdasarkan harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

Apabila dari tahun ke tahun terjadi peningkatan secara keseluruhan, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian di daerah atau negara tersebut telah mengalami pertumbuhan yang baik. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menggambarkan bahwa semakin banyak tenaga kerja yang terserap dalam lapangan kerja, sehingga hal tersebut mampu menurunkan angka pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

2.2 Studi Terkait

Dalam penelitiannya, Putri & Fakhrudin (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap garis kemiskinan di lima kota Provinsi Aceh. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ditemukan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap garis kemiskinan, di mana setiap nilai PDRB sebesar satu rupiah, maka dapat meningkatkan garis kemiskinan sebesar 0,1950. Pada variabel IPG ditemukan bahwa IPG berpengaruh positif dan signifikan terhadap garis kemiskinan, di mana nilai IPG meningkat satu rupiah, maka dapat meningkatkan garis kemiskinan sebesar 0,1950.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih *et al* (2022) merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh indikator pasar tenaga kerja perempuan terhadap kemiskinan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan pendapatan tenaga kerja perempuan memiliki pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan pengangguran terbuka perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan antar kabupaten/ kota di Provinsi Riau.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Andykha *et al* (2018) bertujuan untuk menganalisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan pada 35 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis panel data (*pooling data*) menggunakan data sekunder dengan data *cross-section* terdiri dari 35 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah dan data *time series* yaitu tahun 2011-2015. Hasil analisis menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan pada 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah, dan IPM berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan pada 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.

Putra & Arka (2016) melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, kesempatan kerja, dan tingkat pendidikan secara simultan dan parsial terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/ kota di Provinsi

Bali tahun 2011-2016. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisis data. Berdasarkan penelitian, hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh dominan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/ Kota di Provinsi Bali tahun 2011-2016 dibandingkan kesempatan kerja dan tingkat pendidikan, dengan kontribusi sebesar 64,32 persen.

Selanjutnya, Leonita & Sari (2019) melakukan penelitian yang bertujuan untuk memverifikasi apakah produk domestik regional bruto (PDRB), tingkat pengangguran, dan IPM memberikan kontribusi pada kemiskinan pada 34 provinsi di Indonesia selama periode 2011-2017. Penelitian menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju PDRB, IPM dan pengangguran secara simultan memberikan pengaruh pada kemiskinan. Pada pengujian secara parsial menunjukkan tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh laju PDRB dan pengangguran, sedangkan IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.